

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan suatu tempat yang sangat penting bagi setiap makhluk hidup dalam keberlangsungan kehidupannya. Lingkungan hidup yang baik tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sumber air yang baik pula, hal ini dikarenakan setiap makhluk hidup dalam suatu lingkungan hidup pasti membutuhkan air untuk keberlangsungan kehidupannya. Maka dari itu manusia sebagai salah satu makhluk hidup yang menempati suatu lingkungan hidup perlu melakukan tindakan untuk menjaga keberadaan sumber air yang baik.

Salah satu sumber kehidupan yang juga merupakan sumber daya alam adalah sumber daya air. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan makhluk hidup lainnya. Keberadaan air merupakan bagian dari alam (nature), sehingga eksistensi air terkait erat dengan semua yang ada di alam. Secara lebih spesifik dapat dinyatakan bahwa kualitas dan kuantitas air sangat tergantung dengan banyak hal, aspek, aktivitas, perubahan dan lain-lain yang ada di alam ini.¹

Menurut pasal 1 poin 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 menyatakan bahwa Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah

¹ Robert Ododatie dan M.Basuki, 2005. Kajian Undang-undang Sumber daya air, Andi offset, Yogyakarta, Hlm 4.

permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil, dan Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.

Di kabupaten Melawi, khususnya kecamatan Nanga Pinoh yang memiliki letak geografis diantara dua sungai besar yaitu sungai melawi dan sungai pinoh, serta terdapat beberapa danau, akuifer, sungai-sungai kecil, dan rawa sebagai sumber air. Namun sebagian besar masyarakat di kecamatan Nanga Pinoh mendapatkan air dari sumber air tanah, dengan cara membuat lubang galian air atau sumur, dan juga memanfaatkan air sungai untuk memenuhi kebutuhannya, adapun jenis air tanah sendiri dibagi menjadi dua jenis yaitu sumber air tanah dangkal dan sumber air tanah dalam.

Sumber air tanah dangkal ini sangat mudah ditemui dan juga yang paling banyak digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, dikarenakan untuk mendapatkannya tidak terlalu sulit dibandingkan sumber air tanah dalam. Sedangkan sumber air tanah dalam sering digunakan dalam skala besar dan sempit. Sumber air tanah dalam sendiri sering digunakan oleh perusahaan dan perhotelan yang membutuhkan air dalam jumlah banyak. Pemanfaatan pada sumber air tanah dalam menjadi salah satu faktor penyebab berkurangnya daerah resapan air yang biasanya banyak terjadi dikota besar di Indonesia. Pada sumber air tanah dangkal dan sumber air tanah dalam dapat dilihat perbedaan paling menonjol yaitu letak, pemanfaatan, debit air, dan kemungkinan tercemar.

Air tanah dangkal atau disebut juga air tanah freatik adalah air tanah yang terjadi akibat adanya hujan atau air hujan yang meresap ke dalam tanah dan berkumpul di atas lapisan impermeable (susah meloloskan air atau kedap air) yang terdekat dari permukaan tanah sehingga bisa menjadi penyebab erosi tanah. Kedalaman air dangkal pada setiap tempat biasanya berbeda-beda. Apabila di daratan rendah, pada umumnya permukaan airnya tergolong dangkal. Semakin tinggi permukaan tanah, maka semakin dalam letak air tanahnya. Begitu juga sebaliknya. Hal ini yang dimaksudkan bahwa kedalaman di suatu tempat berbeda-beda. Perbedaan ini dimungkinkan juga akibat jenis dan struktur tanah yang berbeda antara satu dan lainnya serta mungkin juga karena faktor cuaca atau pembagian musim antara musim kemarau dan musim penghujan.²

Air tanah dalam atau disebut juga air tanah artesis adalah air tanah yang berada di bawah lapisan air tanah dangkal dan diantara dua lapisan impermeable (kedap air). Air tanah dalam merupakan lapisan bawah yang biasanya dimanfaatkan sebagai sumber air minum kawasan perkotaan, mulai dari penduduk, hotel maupun industri dan perkantoran yang ada. Adapun factor-faktor yang mempengaruhi air tanah yaitu curah hujan, material batuan, geomorfologi atau lereng dan vegetasi.

Air sebagai komponen lingkungan hidup akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komponen lainnya. Air yang kualitasnya buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan hidup menjadi buruk sehingga akan

² <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/tanah/akuifer>

mempengaruhi kondisi kesehatan dan keselamatan manusia serta kehidupan makhluk hidup lainnya. Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat penting maka harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini berarti bahwa penggunaan air untuk berbagai manfaat dan kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi masa kini dan masa depan. Untuk itu air perlu dikelola agar tersedia dalam jumlah yang aman, baik kuantitas maupun kualitasnya, dan bermanfaat bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya agar tetap berfungsi secara ekologis, guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Di satu pihak, usaha dan atau kegiatan manusia memerlukan air yang berdaya guna, tetapi di lain pihak berpotensi menimbulkan dampak negatif, antara lain berupa pencemaran yang dapat mengancam ketersediaan air, daya guna, daya dukung, daya tampung, dan produktivitasnya.

Agar air dapat bermanfaat secara lestari dan pembangunan dapat berkelanjutan, maka dalam pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Berdasarkan definisinya, Pencemaran air yang diindikasikan dengan turunnya kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Yang dimaksud dengan tingkat tertentu tersebut di atas adalah baku mutu air yang ditetapkan dan berfungsi sebagai tolak ukur untuk menentukan telah terjadinya pencemaran air, juga merupakan arahan tentang

tingkat kualitas air yang akan dicapai atau dipertahankan oleh setiap program kerja pengendalian pencemaran air.

Penetapan baku mutu air selain didasarkan pada peruntukan (designated beneficial water uses), juga didasarkan pada kondisi nyata kualitas air yang mungkin berada antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, penetapan baku mutu air dengan pendekatan golongan peruntukkan perlu disesuaikan dengan menerapkan pendekatan klasifikasi kualitas air (kelas air). Penetapan baku mutu air yang didasarkan pada peruntukan semata akan menghadapi kesulitan serta tidak realistis dan sulit dicapai pada air yang kondisi nyata kualitasnya tidak layak untuk semua golongan peruntukan. Dengan ditetapkannya baku mutu air pada sumber air dan memperhatikan kondisi airnya, akan dapat dihitung berapa beban zat pencemar yang dapat ditenggang adanya oleh air penerima sehingga air dapat tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Beban pencemaran ini merupakan daya tampung beban pencemaran bagi air penerima yang telah ditetapkan peruntukannya.

Mengingat sifat air yang dinamis dan pada umumnya berada dan atau mengalir melintasi batas wilayah administrasi pemerintahan, maka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air tidak hanya dapat dilakukan sendiri-sendiri (partial) oleh satu pemerintah daerah. Dengan demikian harus dilakukan secara terpadu antar wilayah administrasi dan didasarkan pada karakter ekosistemnya sehingga dapat tercapai pengelolaan yang efisien dan efektif. Keterpaduan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ini dilakukan melalui upaya koordinasi antar

pemerintah daerah yang berada dalam satu kesatuan ekosistem air dan atau satu kesatuan pengelolaan sumber daya air antara lain daerah aliran sungai (DAS) dan daerah pengaliran sungai (DPS). Kerja sama antar daerah dapat dilakukan melalui badan kerja sama antar daerah. Dalam koordinasi dan kerja sama tersebut termasuk dengan instansi terkait, baik menyangkut rencana pemanfaatan air, pemantauan kualitas air, penetapan baku mutu air, penetapan daya tampung, penetapan mekanisme perizinan pembuangan air limbah, pembinaan dan pengawasan penaatan.

Jika menyebut mengenai daerah aliran sungai (DAS) dan daerah pengaliran sungai (DPS) sama halnya membahas tentang air permukaan, karena sungai merupakan air permukaan. Mengingat (DAS) dan (DPS) maka dapat dilihat terkait fakta geografis Kabupaten Melawi saat ini, dengan letak geografis yang terdapat dua sungai besar yaitu sungai pinoh dan sungai melawi, namun dari fakta geografisnya, sungai melawi merupakan sungai yang hanya melintas wilayah Kabupaten Melawi, jika dilihat hulu sungai berada di Kabupaten Sintang, dan muara sungai juga kembali berada di sungai kapuas tepatnya muara sungai melawi ini di kota sintang. Berbeda dengan sungai pinoh yang sepenuhnya dari hulu ke hilir berada dalam letak geografis Kabupaten Melawi. Tetapi dalam penulisan ini, perlu penulis batasi bahwa penulisan ini mengenai air tanah, dan sungai bukan merupakan air permukaan.

Mengingat sangat pentingnya keberadaan air tanah bagi kehidupan mahluk hidup, maka perlu adanya pengelolaan yang baik agar keberadaan air tanah yang baik juga dapat terus dinikmati oleh mahluk hidup. Pada saat ini di

kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten melawi sudah banyak berdiri perusahaan-perusahaan perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet, perkebunan-perkebunan tersebut juga membutuhkan air untuk kebutuhannya, maka dari itu sangat penting bagi pemerintah terkait untuk mengatur ketersediaan air dan keseimbangan keberadaan air untuk kebutuhan masyarakat dan kebutuhan perusahaan perkebunan.

Kabupaten melawi, merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam wilayah provinsi Kalimantan barat. Penulis tertarik melakukan penulisan mengenai pengelolaan air oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah kabupaten melawi dikarenakan, letak geografis wilayah kabupaten tersebut yang memiliki banyak sungai besar dan sungai kecil, serta dengan populasi penduduk yang sedang berkembang, pembangunan pemukiman dan industri di wilayah kabupaten melawi sudah sangat jelas terlihat. Adanya fakta tersebut sangat menarik untuk di lakukan penulisan dan penelitian terkait pengelolaan khususnya air oleh pemerintah kabupaten melawi dan lembaga-lembaga yang terkait pengelolaan air serta dalam melestarikan keberadaan air yang baik bagi suatu lingkungan hidup, peran pemerintah saja tidak cukup, maka dibutuhkan juga peran masyarakat setempat untuk bersama-sama mewujudkan keberadaan air yang bersih dan baik bagi suatu lingkungan hidup.

Penulis melihat pemerintah kabupaten/kota berwenang penting dalam upaya mewujudkan keberlangsungan air yang bersih dan baik bagi suatu lingkungan hidup, namun fakta dilapangan bahwa pemerintah kabupaten melawi dalam mewujudkan keberlangsungan air yang bersih dan baik tersebut

dibantu oleh lembaga lain salah satunya Dinas Lingkungan Hidup kabupaten melawi. Maka dari pemaparan penulis diatas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan dan penelitian dengan judul “ Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Perlindungan Kualitas Air Tanah di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat”.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi dalam perlindungan kualitas air tanah di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi dalam perlindungan kualitas air tanah di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penulisan hukum/skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Perlindungan Kualitas Air Tanah di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi dalam perlindungan kualitas air tanah di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada program studi ilmu hukum, khususnya hukum pertanahan dan lingkungan hidup.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Penulis

Penulis berharap hasil penulisan ini mampu menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman penulis dalam mengkaji tentang peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi dalam perlindungan kualitas air tanah di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi.

b. Untuk Masyarakat

Penulis berharap hasil penulisan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan khususnya masyarakat di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi tentang pentingnya perlindungan kualitas air tanah.

c. Untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi

Penulisan ini diharapkan memberikan manfaat bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi melihat fakta di lapangan mengenai perlindungan kualitas air tanah yang dapat memberikan materi pengkajian kepada Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Melawi dalam perlindungan kualitas air tanah di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum ini merupakan karya asli penulis, dan telah dilakukan penelusuran pada berbagai referensi dan hasil penelitian serta dalam media cetak maupun elektronik. Penulisan mengenai Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Perlindungan Kualitas Air Tanah di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, dirasa belum ada yang menulis sama persis dengan apa yang ditulis oleh penulis. Penulis mengambil contoh beberapa skripsi yang mempunyai permasalahan yang dianggap mirip dengan yang diteliti oleh penulis:

Nama Penulis : Martika Dini Syahputri

Judul Penulisan : Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Brantas

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Katolik Dharma
Cendika Surabaya

Hasil Penelitian :

Hasil penelitian disimpulkan peran Dinas Lingkungan Hidup kota Surabaya dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran air sungai brantas di Surabaya sangat penting. Namun, ditemui kendala lemahnya penegakan hukum lingkungan (administrasi, perdata, maupun pidana) yang disebabkan karena proses prapenyidikan, penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh berbagai instansi yang berbeda tidak hanya dilakukan Dinas Lingkungan Hidup.

Peran Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan, penerbitan izin lingkungan serta menindaklanjuti pengaduan secara tertulis maupun lisan. Namun perlu adanya reformasi kelembagaan dengan mempertegas kewenangan Dinas Lingkungan Hidup yang saat ini bersifat koordinatif dan adanya reformasi aparatur sehingga meningkatkan integritas dan kemampuan aparat hukum.

Nama Penulis : Agus Hendra

Judul Penulisan : Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Sungai Melawi Di Kabupaten Sintang

Rumusan Masalah : Bagaimana penegakan Hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal sebagai upaya pengendalian pencemaran sungai melawi di kabupaten sintang ? dan apakah ada factor penghambat dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal di kabupaten sintang ?

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin di kabupaten sintang belum maksimal dilakukan oleh dinas pertambangan dan energy Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang dan Kepolisian resor sintang. Dinas Pertambangan dan energy ataupun Dinas Lingkungan belum melakukan pembinaan pelaku PETI, sedangkan Kepolisian

resor sintang sudah melakukan patrol dan razia terhadap pelaku PETI tersebut diakibatkan adanya kendala sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kesadaran hukum pelaku PETI
2. Kurangnya sarana dan personil pihak kepolisian resor sintang untuk melakukan razia dan patrol.

Nama Penulis :Tedy Verdyanto Kurniawan

Judul Penulisan :Peran Badan Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Bengawan Solo, Di kabupaten Sukoharjo.

Rumusan Masalah :Bagaimanakah Peran Badan Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo ? dan Apakah Kendala Yang di Hadapi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo ?

Instansi :Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut:

1. BLH Kabupaten Sukoharjo telah melakukan pengendalian pencemaran sungai bengawan solo dengan baik dan meskipun belum maksimal. BLH Sukoharjo telah melakukan rehabilitasi air permukaan, pelibatan peran masyarakat, dan mempromosikan gerakan penyelamatan sungai bengawan solo. Hanya saja, BLH sSkoharjo belum berani bersikap tegas terhadap kegiatan industry yang membuang limbahnya tanpa diolah lebih dahulu langsung ke sungai.

2. Belum maksimalnya BLH Kabupaten Sukoharjo dalam pengendalian pencemaran sungai bengawan solo disebabkan oleh kendala sebagai berikut : terlalu luasnya DAS bengawan solo, sector industri merupakan andalan perekonomian Kabupaten Sukoharjo, dan keterbatasan dana BLH Kabupaten Sukoharjo.

Dari Ketiga penulisan skripsi tersebut diatas berbeda dengan rencana penelitian penulis dalam hal fokus permasalahannya ataupun tempat penelitiannya.

Penulisan pertama memfokuskan pada Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Brantas, Penulisan kedua memfokuskan pada pelaksanaan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal sebagai upaya pengendalian pencemaran sungai melawi di kabupaten sintang, Penulisan ketiga menekankan pada pengendalian pencemaran sungai. Sedangkan skripsi yang penulis tulis lebih menekankan pada perlindungan kualitas air tanah di Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Sehingga terdapat perbedaan yang signifikan baik dari lokasi penelitian dan juga obyek yang penulis teliti.

F. Batasan Konsep

1. Peran

Peran menurut kamus besar bahasa indonesia adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Perananan adalah tindakan-tindakan atau usaha-usaha yang dilakukan oleh sesuatu badan usaha, organisasi dan/atau instansi tertentu untuk kemajuan, perkembangan dan keberhasilan.³

2. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan Lembaga Teknis Daerah yang merupakan salah satu pendukung Bupati yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. DLH yang dulunya disebut Badan Lingkungan Hidup (BLH) kini telah berganti nama menjadi DLH yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan. DLH dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun dasar hukum keberadaan DLH adalah PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

3. Perlindungan Kualiatas Air

a. Perlindungan

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Definisi kata perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan perlindungan ialah proses, cara, perbuatan, yang bertujuan melindungi.

b. Kualitas

Definisi kata kualitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tingkat baik dan buruknya sesuatu.

Dalam pengujian kualitas air, kontaminan dalam air biasanya diklasifikasikan ke dalam fisika, kimia, dan biologi. Ada tidaknya kontaminan tertentu dalam air tergantung pada sumber air. Untuk menentukan apakah kontaminan tertentu dalam air dapat diizinkan atau tidak harus diketahui (1) sifat dan jumlah kontaminan yang ada; (2) untuk apa penggunaan air tersebut; (batas ambang berbagai kontaminan tersebut untuk masing-masing penggunaan).⁴

c. Air

Definisi kata air dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah cairan jernih tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau yang terdapat dan diperlukan dalam kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan yang secara kimiawi mengandung hidrogen dan oksigen, benda cair yang biasa terdapat di sumur, sungai, danau yang mendidih pada suhu 100o C (seratus derajat celcius).

Air adalah senyawa H₂O yang merupakan bagian paling penting dalam kehidupan dan manusia tidak dapat dipisahkan dengan air. Air

⁴ Siswo Sumardiono dan Budiyo. 2013. Teknik Pengelolaan Air. Graha Ilmu . Yogyakarta: Hlm 24

dalam tubuh manusia berkisar antara 50 - 80% dengan rincian 55% - 60% berat badan orang dewasa terdiri dari air, untuk anak-anak sekitar 65% dan untuk bayi sekitar 80% dari seluruh badan⁵.

d. Standar kualitas air

Kualitas air adalah karekteristik mutu yang dibutuhkan untuk pemanfaatan tertentu dari sumber-sumber air. Adanya standar kualitas air, dapat membuat orang mengukur kualitas dari berbagai macam sumber air.

Standar kualitas air minum dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010 yang dituangkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan atau angka yang menunjukkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar air tersebut tidak menimbulkan gangguan kesehatan, penyakit, gangguan teknis, serta gangguan dalam segi estetika.

Sesuai dengan dasar pertimbangan penetapan kualitas air minum, usaha pengelolaan terhadap air yang digunakan oleh manusia sebagai air minum berpedoman pada standar kualitas air terutama dalam penilaian terhadap produk air minum yang dihasilkannya, maupun dalam merencanakan sistem dan proses yang akan dilakukan terhadap sumber daya air.

⁵ Pius Ginting. 2013. Ekologi Mark: Materialisme dan Alam. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup, Hlm 6

4. Air Tanah

Air Tanah adalah Air yang berada dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah, yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.

Air tanah dangkal adalah air tanah yang terdapat di atas lapisan kedap air pertama, biasanya terletak tidak terlalu dalam di bawah permukaan tanah. Air tanah yang terjadi karena ada daya proses peresapan air dari permukaan tanah.⁶

5. Perlindungan Kualitas Air

Perlindungan Kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sehingga tercapai peruntukannya untuk menjamin sehingga kualitas air tanah tetap dalam kondisi alamiahnya.

Karakteristik air dipengaruhi oleh faktor –faktor manusia, sehingga kualitas air sangat beragam dari satu tempat ke tempat lain. Standar – standar kualitas air merupakan harga–harga yang ekstrim yang digunakan untuk meningkatkan tingkat–tingkat air dimana air menjadi ofensif secara estetik, tidak sesuai secara ekonomik maupun tidak layak secara higienik untuk penggunaan air⁷.

⁶ Totok sutristo dan Eni Suciastuti. 2010. Teknologi Penyediaan Air Bersih. Penerbit PT Rineka Cipta. Jakarta. Hlm 17

⁷ Richard Lee. 1986. Hidrologi Hutan. Gadjah Mada University: Press. Hlm 270 dan 276

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis melakukan penulisan hukum Empiris, artinya dilakukan/berfokus pada fakta-fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data Primer yang didukung dengan data Sekunder.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian ini berfokus pada fakta social dan prilaku masyarakat hukum. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berdasarkan pada data primer dan data sekunder. Jadi dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang/menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku, sedang data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti (sebagai data utama). Data diperoleh secara langsung dari responden dan/atau narasumber terkait pengendalian

kualitas air tanah di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari kepustakaan yang berwujud peraturan perundang-undangan, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

Data sekunder ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yang digunakan antara lain :
 - a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.
- 2) Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendapat hukum, doktrin, asas hukum, fakta hukum, dokumen (berupa risalah, putusan hakim, naskah otentik, dan data statistik dari instansi resmi), dan nara sumber.